

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Syarat pembentukannya sebuah negara tentu terdapat pemerintahan, wilayah dan warga negara yang berdaulat. Adapun lembaga-lembaga seperti di antaranya birokrasi sipil dan militer, partai politik, sistem pendidikan nasional, serta kemajuan komunikasi dan transportasi serta identitas nasional yang merujuk pada karakter kolektif bangsa dan dasar historis-kulturalnya. Jadi sejarah nasional berfungsi untuk melambangkan identitas bangsa serta untuk melegitimasi eksistensi negara nasional (Kartodirdjo, 1999, hlm. 29).

Proklamasi kemerdekaan yang berhasil dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 tidak serta merta membawa Indonesia pada kondisi yang aman dan tenteram. Sebagai negara yang baru merdeka, Indonesia perlu membenahi setiap sendi kehidupan yang menyangkut kesejahteraan rakyatnya. Dalam usaha untuk menata diri menjadi negara yang utuh, pada waktu yang bersamaan Indonesia harus pula menghadapi berbagai tantangan, salah satunya Indonesia harus menghadapi dorongan dari luar negeri. Seperti yang kita ketahui bahwa pada periode awal kemerdekaan Indonesia belum sepenuhnya mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda. Berbagai taktik dan usaha dilakukan Belanda sebagai upaya untuk kembali menduduki dan menguasai Indonesia. Dalam hal ini sedikitnya Indonesia telah melakukan empat kali diplomasi sebagai upaya untuk mempertahankan kedaulatannya.

Akhirnya pada tanggal 23 Agustus 1949 diadakannya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan persekutuan Indonesia- Belanda yaitu RIS (Republik Indonesia Serikat). Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat lagi dan tidak dapat dicabut. Karena mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 23 Desember 1949, Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Penandatanganan dilakukan secara bersamaan, baik di Indonesia maupun Belanda pada

tanggal 27 Desember 1949 (Maeswara, 2010, hlm. 226). Dampak hasil dari KMB di bidang keamanan adalah terbentuknya APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sebagai angkatan perang nasional RIS (Suryawan, 2013, hlm. 2)

Masalah yang dihadapi negara setelah terbentuknya angkatan bersenjata ialah apa yang akan dilakukan dengan tentara, inilah persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah tahun 1950-an, pada tahun 1950 politisi sipil beranggapan bahwa untuk menentukan urusan militer adalah hak mereka (Ricklesf, 1981, hlm. 359). Melihat keadaan politik yang sangat memanas, tentara mengambil sikap dengan melakukan reorganisasi dan rasionalisasi atas perintah dari kabinet yang sedang berkuasa dengan tujuan agar militer lebih baik dalam berorganisasi. Semakin matangnya angkatan bersenjata membuat kebutuhan dalam organisasi angkatan bersenjata semakin banyak. Untuk menyempurnakan organisasi di angkatan bersenjata, maka dari itu angkatan bersenjata Indonesia membentuk beberapa lembaga militer yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Angkatan bersenjata dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kelompok separatis yang ingin merusak kesatuan sebuah negara. Tetapi terciptanya angkatan bersenjata tidak lepas dari problematika yang sangat Panjang dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Dalam prosesnya ketika kebijakan pimpinan nasional menunda pembentukan tentara nasional yang menyebabkan keadaan semakin kacau. Dimana terjadi pertempuran yang bersifat kedaerahan yang tidak dikelola dengan strategi yang matang sehingga banyak menimbulkan kegagalan. Oleh karena itu pemerintah memusatkan tenaga untuk merubah unit-unit militer yang berkomitmen rendah menjadi hierarki militer yang efektif (Cribb, 2010, hlm. 140).

Setelah terbentuknya angkatan bersenjata Republik Indonesia kondisi dalam negara masih belum stabil karena masih banyak wilayah yang ingin mendirikan negaranya sendiri pada perkembangan selanjutnya, tahun 1950-an situasi politik dan keamanan dalam negeri semakin memburuk karena munculnya pemberontakan-pemberontakan yang terjadi salah satunya pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Munculnya akibat dari berbagai konflik antar elite politik di Sulawesi Selatan.

Terjadi persaingan antar elite dalam mendapatkan kekuasaan, baik karena perbedaan aliran politik maupun pandangan dalam mencapai tujuan bangsa sesudah kemerdekaan (Nas, 2014, hlm. 206). Dalam menumpas pemberontakan, Alex Kawilarang yang merupakan panglima Tentara Teritorium III mengalami kesulitan dalam berbagai pertempuran, satuan-satuan kecil RMS sering berhasil mematahkan atau mengagalkan serangan yang dilakukan. Hal itu sangat menarik perhatian pemimpin operasi dan para komandan. Mereka menyaksikan sendiri keuletan serta keunggulan taktik dan teknik dari pasukan inti RMS yang kecil tapi efektif.

Letnan kolonel Ignatius Slamet Riyadi panglima penumpas RMS mempunyai keinginan untuk membentuk suatu pasukan istimewa yang kecil efektif. Kemudian ide tersebut disampaikan kepada Kolonel Alex Kawilarang yang merupakan pemimpin umum operasi dan menjabat sebagai panglima Tentara Teritorium III. Ide tersebut terinspirasi juga setelah ia mengetahui kemampuan pasukan komando Inggris yang lebih dikenal dengan pasukan “*green berrets*” pada saat perang dunia ke II, sehingga ia berkeinginan untuk membentuk pasukan komando yang memiliki kemampuan serupa (Israr, 2010, hlm. 237). Tetapi ide tersebut belum terealisasi karena gugurnya Slamet Riyadi dalam operasi di Ambon namun cita-citanya untuk membentuk pasukan khusus tidak berhenti di tengah jalan karena Alex Kawilarang ingin meneruskan membentuk pasukan khusus tersebut.

Pada saat Kolonel Alex Kawilarang diangkat menjadi panglima TT III/Siliwangi, Alex Kawilarang dihadapkan pada tugas berat yaitu pemberontakan DI/TII yang ada di Jawa Barat. Pemberontakan yang dipimpin oleh Kartosoewirjo yang telah melakukan keganasan terhadap penduduk Jawa Barat berupa pembakaran kampung-kampung, pembunuhan terhadap rakyat yang tidak berdosa dan tidak bersenjata. Sedangkan dalam menghadapi tentara siliwangi mereka menggunakan taktik “Serang dan Lari” (*Hit and Run*) yang membuat Alex Kawilarang kewalahan menanganinya (Kopassus, 2009, hlm. 4)

Melihat situasi yang memaksa betapa pentingnya memiliki suatu pasukan istimewa ketika sedang sibuk menghadapi pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dengan merintis jalan ke arah dasar-dasar

pembentukan pasukan khusus yang kemudian dinamakan kesatuan Komando. Alex Kawilarang membentuk pasukan kecil tetapi memiliki kemampuan untuk melakukan penyerangan secara cepat, efektif dan efisien. Dengan persiapan yang seadanya akhirnya Panglima TT III/Siliwangi Kolonel A.E. Kawilarang mengeluarkan Instruksi No. 55/Insr/PDS tertanggal 16 April 1952 tentang pembentukan dan penetapan kesatuan Komando Tentara dan Teritorium III, disingkat Kesko TT III. Kemudian tanggal 18 April 1952, Sebanyak 27 orang perwira, bintara, dan tamtama di lingkungan TT III/Siliwangi diorganisasikan ke dalam Kesko TT III yang sebagian diantara mendapatkan tugas yang rangkap sebagai pelatih untuk melengkapi Organisasi dan membantu tugas Kesko TT/III (Disjarah, 2015, hlm, 21-23). Maka secara tidak langsung Alex Kawilarang memudahkan dalam merealisasikan pembentukan pasukan khusus, dan kepentingan pengembangan prajurit TNI AD.

Komandan peratama kesatuan yang baru terbentuk tersebut dipercayakan kepada Mayor Moch. Idjon Djanbi (1952-1956) dan sementara pangkalan satuan ditempatkan di Depo Batalyon jalan Manado Bandung (sekarang Rindam III/Siliwangi). Mayor Idjon Djanbi merupakan seorang mantan tentara Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia, sebelum berpindah kewarganegaraan Idjon Djanbi seorang kapten tentara kerajaan Belanda, memiliki banyak pengalaman di bidang pasukan istimewa Baret Hijau, terutama pada perang Dunia II. Memunculkan gagasan untuk menjadikannya sebagai pelatih calon prajurit komando yang segera akan dibentuk. Kolonel Alex Kawilarang kemudian mengutus Mayor Suwanto untuk meminta kesedian Idjon Djanbi untuk melatih pasukan komando (Sihotang. dkk, 2000, hlm. 17).

Pada tanggal 24 Mei 1952, dibuka pelatihan *Recruitering* calon pelatihan komando dengan mengambil tempat di Cimahi, para siswanya diambil dari bintara pelatih Sekolah Kader Infanteri (SKI) pimpinan Kapten Paikun ditambah dari pelatih Depot Batalyon pimpinan Kapten Sammi Rahardjo. Jumlah siswa sebanyak 15 orang segera dilatih, digembleng dan diberikan pengetahuan khusus tentang pelajaran komando. Hampir dua bulan mereka digembleng sebagai calon pelatih khusus komando, kemudian yang dinyatakan lulus hanya sebanyak 8 orang. Sementara itu, di

Batujajar telah dipersiapkan sebuah asrama semi permanen untuk dijadikan sebagai basis Kesko TT III/Siliwangi. Lokasinya menempati dibagian belakang dari asrama satuan Artileri Lapangan IV Teritorium III/Siliwangi. Pada tanggal 1 juli 1952, bertempat di Batujajar dibuka Pendidikan Komando Angkatan pertama. Jumlah siswa pelajarannya sebanyak 400 orang (Kopassus, 2009, hlm. 15).

Kemudian ditambah dari satuan-satuan yang secara sukarela telah mendaftarkan diri diantaranya Letnan Moh. Amin dan Serma Sobari. Lokasi pelatihan berbasis komando dilaksanakan di daerah sekitar Batujajar. Kemudian dilanjutkan dengan pelatihan *Jungle Fighting* di hutan Jayagiri dengan *Stormbaan (Assault Trak)* di gunung Puteri Lembang. Pelatihan *Meerdaag Opening* selama satu minggu dengan *Strarting Point* di Ciwidey, Cidaun (Pantai Selatan Cianjur) dan kembali ke Pangalengan. Keadaan medan Pendidikan komando saat itu diselenggarakan didaerah yang masih rawan akan gerombolan DII/TII, sehingga pelaksanaan pelatihan ini sekaligus sebagai “*Sweeping*” ketempat-tempat yang diduga sebagai “*Home Base*” gerombolan DI/TII. Selama dalam pelatihan komando didaerah ini telah diadakan *Aerial Supply*, yang pertama kali dengan diadakan kerjasama dengan TNI Angkatan Udara. Pada tanggal 8 Desember 1952 bertempat di Batujajar Pendidikan komando taraf I angkatan pertama dinyatakan ditutup. Dari 400 siswa yang mengikuti Pendidikan komando hanya 242 orang yang dinyatakan lulus dalam Pendidikan tersebut (Disjarah, 2015, hlm. 29).

Berdasarkan surat keputusan KSAD Nomor : 3/KSAD/KPTS/53 tanggal 14 Januari 1953, kesatuan Komando Tentara & Teritorium III/Siliwangi dialih statuskan dari panglima TT III/Siliwangi kepada KSAD (Disjarah, 2015, hlm. 33). Kemudian namanya diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD). Kemudian disusul dengan pengumuman inspektorat Infanteri, pada tanggal 9 Febuari 1953 tentang KKAD diserahkan terimakan kepada Markas Besar Angkatan Darat Untuk meningkatkan kualitas KKAD agar berjalan terus (Sihotang. dkk, 2000, hlm. 27). Setelah pergantian tersebut pasukan diberikan pelatihan-pelatihan, pada tanggal 30 Agustus 1954 pelatihan laut dimulai yang diadakan di dua tempat yang berbeda yakni di pantai Cilincing dan pantai Cilacap.

Berdasarkan surat keputusan KSAD tanggal 25 juli 1955 status KKAD dirubah menjadi Resimen dan Namanya diganti menjadi Resimen pasukan Angkatan Darat disingkat menjadi RPKAD (Kopassus, 2009, hlm. 32). Untuk lebih memantapkan organisasi dalam peningkatan dan pengembangan fungsi Pendidikan, dan disahkannya wadah Pendidikan dengan nama Sekolah pasukan Komando Angkatan darat disingkat SPKAD. Pada upacara peresmian RPKAD tersebut, Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta meresmikan satuan Resimen Pasukan Angkatan Darat (RPKAD) dan Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat (SPKAD) yang bertempat di Batujajar (Kopassus, 2009, hlm. 33). Sementara komandan RPKAD masih tetap dipercayakan kepada Mayor Moch. Idjon Djanbi, sedangkan komandan SPKAD dirangkap oleh wakil Komandan RPKAD Mayor R.E. Djaelani.

Mayor Idjon Djanbi memiliki keinginan untuk meningkatkan kemampuan pasukan komando semaksimal mungkin karena melihat geografi Indonesia terdiridari pulau-pulau sehingga salah satu alternatif dalam penggunaan pasukan yang bisa gerak cepat adalah memberikan kemampuan para. Pada tanggal 15 Mei 1956 dimulai pendidikan para pertama bagi prajurit RPKAD yang dilaksanakan di Wing Pendidikan 001/AURI, Margahayu Bandung (Sihotang. dkk, 2000, hlm. 36).

Pada 1956 Mayor Moch. Idjon Djanbi mengajukan permohonan berhenti dengan hormat hak pensiun. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya selama membentuk pasukan para komando maka sesuai dengan keahliannya dalam masalah pertanian, Idjon Djanbi disalurkan menjadi Administratur perkebunan di Cukul, Subang. Dengan pensiunnya Mayor Idjin Djanbi, maka Mayor R.E. Djaelani diangkat untuk menggantikannya yang saat itu menjabat sebagai Wadan merangkap Menjadi Komandan Sekolah Pasukan Komando. Tetapi tidak berselang lama Mayor R.E. Djaelani yang memiliki ideologi yang menyimpang dari dasar negara digantikan oleh Mayor Kharudin Nasution (Kopassus, 2009, hlm. 38).

Pada tahun 1957 terjadi pergolakan politik yang memanas, di Sumatera terjadi pemberontakan PRRI kemudian disusul di Sulawesi Utara dengan pemberontakan Permesta. Maka RPKAD berperan penting dan menunjukkan kemampuannya dalam menjalankan tugasnya dengan gemilang, dalam operasi penumpasan PRRI dan

Permesta untuk pertama kalinya dilakukan operasi Lintas Udara dan operasi Komando. SPKAD sebagai unsur Pendidikan terpaksa harus menghentikan kegiatan Pendidikan, karena semua personel langsung mengikuti kegiatan untuk mendukung operasi-operasi dalam menjaga keutuhan dan keamanan pemerintah Republik Indonesia.

Pada pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI berbagai pendekatan bijaksana ditempuh pemerintah pusat dan pimpinan AD untuk meredam pertikaian politik di wilayah TT I/Bukit barisan ternyata tidak berhasil. Pada akhirnya mereka memproklamkan berdirinya pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) (Pusat Sejarah TNI, 2012, hlm.80), dengan perdana Menteri Syafruddin Prawiranegara. Dewan Banteng ternyata melibatkan diri dalam gerakan sparatis PRRI yang hendak memisahkan diri dari Negara Kesatuan RI. Oleh karena jalan perundingan telah tertutup maka operasi militer dijalankan. TNI segera menyiapkan serangan gabungan yang terdiri dari TNI AD, AL, dan AU. Beberapa operasi yang dilakukan diantaranya operasi Tegas untuk mengamankan daerah Riau, operasi 17 Agustus untuk mengamankan seluruh wilayah Sumatera Barat, operasi Sapta Marga untuk menguasai untuk mengamankan seluruh wilayah Sumatera Timur, operasi Sadar untuk mengamankan seluruh wilayah Sumatera Selatan. Operasi Tegas dipimpin langsung oleh Letkol Kaharudin Nasution. Operasi ini merupakan operasi gabungan pertama yang dilancarkan untuk menumpas dan merebut kedudukan PRRI di daerah Riau darat, terutama untuk menduduki kota Pekanbaru (Sihotang. dkk, 2000, hlm. 158).

Pada tanggal 3 Agustus 1958 di stadion kota Manado dilaksanakan pengalihan pimpinan dari Mayor Kaharudin Nasution kepada Letnan Kolonel Moeng Parhadimulyo (1958-1965). Setelah pelantikan Letkol Moeng Parhadimulyo langsung memimpin operasi untuk merebut kembali kota Tondano dari pemberontak Permesta. Pada periode kepemimpinan Letkol Moeng Parhadimulyo dilakukan pengembangan dan penciptaan dalam bidang taktik pasukan, Teknik persenjataan, dan peralatan lainnya (Sihotang. dkk, 2000, hlm.42). Kemudian pada tanggal 21 Desember 1959, nama Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat di ubah menjadi Resimen para Komando Angkatan Darat dengan singkatan tetap RPKAD. Nama tempat Pendidikan

juga dirubah menjadi Sekolah Para Komando Angkatan Darat disingkat SPKAD bertempat di Batujajar (Disjarah, 2015, hlm. 61).

Menurut Sihotang (2000, hlm. 48) Dalam perjalanan sejarahnya, pada tanggal 16 juni 1962 singkatan nama Resimen Para Komando Angkatan Darat pernah berubah menjadi Menparkoad, juga singkatan Sekolah Para Komando Angkatan Darat juga diubah menjadi Separkoad dan baik secara organik maupun administrasi berada di bawah Menparkoad. Komandan Menparkoad tetap dijabat oleh Kolonel Moeng Parhadimulyo yang dilantik pada tahun 1958. Pada tanggal 9 juli 1963 terjadi pergeseran kepemimpinan Menparkoad. Berdasarkan surat keputusan Men/Pangad, Letnan Kolonel Sarwo Edhie Wibowo diangkat menjadi Wadan Menparkoad, sedangkan jabatannya sebagai komandan Serparkoad digantikan oleh Letkol R.S. Priyo Pranoto (Sitohang, 200, hlm. 52).

Pada tanggal 8 September 1963 Presiden Soekarno memanggil berbagai instansi ke istana Bogor dan menjelaskan akan adanya ekspedisi gabungan Indonesia-jepang ke bagian tengah Irian Barat dengan tujuan pendakian untuk tujuan penelitian ilmiah. Pada tanggal 1 Maret 1964, prajurit yang bergabung dalam ekspedisi tersebut berhasil dengan mengibarkan Sang Saka Merah Putih di puncak tertinggi (puncak Jaya Wijaya). Bermula dari keberhasilan tersebut, maka keterampilan *Mountaineering* dijadikan sebagai salah satu materi dalam pembekalan dalam kurikulum Pendidikan komando di Batujajar (Disjarah, 2015, hlm 75).

Pada bulan Januari 1965 terjadi pergantian beberapa pejabat di lingkungan Menparkoad termasuk pimpinan Menparkoad. Kolonel Moeng Parhadimulyo mendapat tugas baru di SUAD, sehingga jabatan pimpinan Menparkoad diserahkan kepada Kolonel Sarwo Edhie Wibowo yang sebelumnya menjabat sebagai menjadi Wadan Menparkoad atau kepala Staf Menparkoad. Sementara kepala Staf Menparkoad dipercayakan kepada Letkol R.S. Pranoto. Pada bulan Februari 1966, nama Resimen Para Komando Angkatan Darat yang disingkat Menparkoad diubah menjadi Pusat Pasukan Khusus Angkatan Darat yang disingkat menjadi PUSPASSUS AD. Juga terjadi perubahan nama Sekolah Para Komando Angkatan Darat yang disingkat



SEPARKOAD diubah menjadi Pusat Pendidikan Para Komando Angkatan Darat disingkat PUSDIKPASSUS AD (Disjarah, 2015, hlm. 82).

Penelitian mengenai pasukan khusus memang sudah banyak ditulis oleh para peneliti lain. Namun penelitian khusus mengenai Organisasi pasukan khusus dalam operasi militer masih jarang ditemui. Studi yang sering dikaji ialah mengenai peranan tokoh dalam pembentukan pasukan khusus. Contoh studi yang ditulis oleh Nurzaman (2013). Penelitian yang dilakukan beliau menitik beratkan pada peranan Alex Kawilarang dalam pembentukan pasukan Khusus angkatan darat. Lalu, Harisman (2014). Menuliskan fokus peran tokoh dalam pembentukan pasukan khusus gerak cepat tetapi dalam lingkungan Angkatan Udara. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Nurodin (2016) yang meneliti sepak terjang Sarwo Edhie Wibowo dalam menjaga Stabilitas keamanan Nasional Indonesia. Sedikit berbeda dengan tulisan yang dilakukan oleh Azhari (2012) lebih memfokuskan hanya pada reorganisasi dan rasionalisasi di angkatan Laut.

Alasan penulis memilih penelitian ini karenapada saat pengakuan kedaulatan Indonesia oleh belanda pada tahun 1949 belum memiliki sebuah pasukan khusus yang dibekali dengan kemampuan dan perlengkapan khusus untuk menjalankan sebuah operasi militer yang bersifat rahasia. Lalu karena banyak terjadinya gerakan-gerakan separatis yang terjadi di Indonesia, maka dibutuhkannya sebuah pasukan dalam jumlah kecil tetapi memiliki kemampuan diatas rata-rata untuk menjalankan misi penumpasan gerakan sparatis tersebut. kemudian pembatasan tahun dalam penelitian ini dimulai dari tahun 1959 karena selama kurun waktu 7 tahun terhitung dari tahun 1959 sampai 1966 telah terjadi operasi-operasi militer oleh pasukan khusus angkatan darat baik yang bersifat operasi militer untuk berperang maupun operasi militer selain perang. Selanjutnya alasan penulis membatasi waktu penelitian sampai tahun 1966 adalah karena pada tahun tersebut Resimen Para Komando Angkatan Darat kembali mengalami reorganisasi dan berubah menjadi Pusat Pasukan Khusus TNI AD (PUSPASSUS TNI AD). Pada kurun tahun 1959-1966 inilah yang akan menjadi pokok bahasan penulis dalam menulis karya ilmiah ini, sebab dalam prosesnya peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa yang sangat besar dan belum terlalu banyak

terdokumentasikan. Berdasarkan pada uraian diatas, peneliti tertari untuk membahas operasi-operasi militer tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok-pokok pikiran di atas, terdapat satu permasalahan utama yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini, permasalahan tersebut termuat dalam pertanyaan **“Bagaimana Peran Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966”**. Sementara untuk memfokuskan permasalahan yang akan dikaji agar lebih jelas dan terarah maka peneliti menjabarkannya dalam beberapa pokok permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yang akan dibahas, diantaranya adalah:

1. Mengapa organisasi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) didirikan tahun 1952-1959?
2. Bagaimana proses pembentukan organisasi Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) ?
3. Bagaimana Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam melakukan operasi militer pada tahun 1959-1966?

## 1.3 Tujuan Masalah

Setelah penulis menentukan rumusan masalah agar penelitian menjadi jelas dan terarah maka selanjutnya tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan karya tulis ilmiah ini yaitu sebagai berikut :

1. Menjelaskan proses berdirinya Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) tahun 1952-1959. Dalam pembahasan ini akan dipaparkan mengenai situasi Indonesia pada saat itu, kebutuhan pasukan khusus dan tokoh-tokoh yang memprakarsai munculnya RPKAD
2. Menjelaskan proses perubahan Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD). Dalam pembahasan ini akan di paparkan mengenai awal mula berdirinya oraganisasi

pasukan khusus, serta menjelaskan reorganisasi yang terjadi dalam organisasi, dan menjelaskan pengembangan pasukan khusus.

3. Menjelaskan bagaimana peran Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam operasi militer di Indonesia. Dalam pembahasan ini akan di paparkan mengenai operasi-operasi militer yang melibatkan pasukan khusus Angkatan darat yaitu RPKAD dan juga dampak dari operasi tersebut.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian tentunya diharapkan mampu memberikan manfaat, adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Segi Teoritis
  - a. Diharapkan dapat menambah wawasan mengenai Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam operasi militer di Indonesia.
  - b. Memperkaya penelitian sejarah Nasional terutama dalam peristiwa operasi militer di Indonesia
  - c. Diharapkan membantu untuk para peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema yang sama namun dengan judul yang berbeda.
2. Segi Praktis
  - a. Penulisan ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, patriotik dan cinta tanah air bagi para pelajar dan mahasiswa yang membaca.
  - b. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan belajar siswa pada mata pelajaran sejarah Indonesia.
  - c. Penulisan ini diharapkan menjadi dokumentasi peristiwa sejarah yang pernah dilakukan oleh militer dalam hal ini pasukan khusus Angkatan Darat yang saat ini bernama Komando Pasukan Khusus (KOPASSUS)

#### **1.5 Struktur Organisasi Skripsi**

Adapun sistematika dalam penulisan Skripsi yang dilakukan oleh peneliti di sesuaikan dengan buku Pedoman Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia pada tahun 2018, adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam Bab ini peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian dan penulisan Skripsi. Dalam latar belakang diungkapkan mengenai keterkaitan penulis dalam mengkaji topik tersebut serta pentingnya membahas mengenai topik tersebut. Untuk memfokuskan dalam membatasi permasalahan dalam melakukan penelitian maka dicantumkan rumusan masalah dan batasan masalah sehingga dapat dikaji secara khusus dalam penulisan ini. Dimuat mengenai metode dan Teknik penelitian, juga sistematika penulisan yang menjadi kerangka dan pedoman penulisan karya ilmiah ini.

Bab II Kajian Pustaka. Bab ini berisi pemaparan tentang sumber literatur yang digunakan peneliti sebagai referensi yang relevan dalam penelitian ini, baik berupa buku maupun penelitian sebelumnya, pada bab ini penulis memaparkan teori dan konsep yang dipakai dalam penulisan ini terutama dalam memaparkan pembahasan atau inti dari penulisan ini.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dipergunakan dalam penulisan berupa metode penulisan dan Teknik penelitian yang menjadi titik tolak penulis dalam mencari sumber serta data-data, pengolahan data dan cara penulisan. Penulis berusaha memaparkan metode yang digunakan untuk merampungkan rumusan masalah penelitian. Semua prosedur serta tahapan-tahapan yang ditempuh dalam melakukan penelitian dimulai dari persiapan sehingga penelitian berakhir diuraikan secara rinci dalam bab ini.

Bab IV Pembahasan. Bab ini diuraikan hasil-hasil temuan penulis selama melakukan penelitian. Hasil analisis penulis yakni dengan cara mengaitkan antara hasil-hasil temuan dengan berbagai konsep, teori serta sumber-sumber yang telah diperoleh. Bab ini menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi. Pada bab ini peneliti mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini serta kesimpulan inti dari bab IV sebagai bab pembahasan, bab ini juga sebagai bagian penutup dari penelitian ini, dalam bab ini juga mengemukakan rekomendasi dari peneliti baik untuk para pembaca maupun bagi penelitian selanjutnya.